



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555 /217 TAHUN 2023
TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2023
NOMOR
TENTANG

TIN KORDINAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kepentingan Paser (I)
Peraturan Bupati Purwoluhus Motot 20 Tahun 2021
tentang Sistem Penegentikan Bupati tentang Tin Kordinasi
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tin Kordinasi
Sistem Penegentikan Bupatis Elektronik Kependidikan
Bupatilah (Peraturan)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang
Penegentikan Diketahui Nasional Dalam
Pengembangan Poldam Djawa Tengah (Berdasarkan
Perppu Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Ketegentikan Hukumasi Puplik (terpimpin Nasional
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tampaknya
Perwakilan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Penegentikan Daerah (Perwakilan Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Jasa Pimpinan Perwakilan
Negara Republik Indonesia Nomor 2527) sebagaimana
berikutnya ditambah dan/atau diubah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perwakilan
Perwakilan Penegentikan Perubahan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2023 tentang Qbla Kelas menjadi Undang-
Undang (Perwakilan Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 4), Tampaknya Perwakilan Negara Republik
Indonesia Nomor 6256);

4. Peraturan Perundang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pegawai Kepada Kepala Kabupaten Hukumasi (perpimpinan
tertentu Pegawai Kepada Kabupaten Hukumasi Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan Perundang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Nomor 3010 Tahun 2010 Nomor 39
Tampaknya Perwakilan Negara Republik Indonesia Nomor
2013 Nomor 41, Tampaknya Perwakilan Negara Republik
Indonesia Nomor 6256);

5. Peraturan Penegentikan Nomor VI Tahun 2010 tentang
Jadwalpengetahuan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Perpimpinan Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 185, Tampaknya Perwakilan Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.

8. Bestätigung der Absichtserklärung über die Ausübung der Rechte des Investors nach § 15d Absatz 1 Satz 1 und 2 des BGB

Geleceğin Yüzyılında Bulgaristan'ın
Tarihi (1900-2000) / Prof. Dr. Mihalıççioğlu
Balkanlar Üzerinde Bulgaristan'ın
Politikası (1900-2000) / Prof. Dr. Mihalıççioğlu

Topsoe 3023 Motor 35; 3023-3026 (Belt) Design Kspibusen Pumpen
3023-3026 (Belt) Design Kspibusen Pumpen
Einführung Pumpeinsatz Kspibusen Pumpen
Innung für Rechner Systeme Förderanlagen
10. Februar 2005 Bsp. Pumpen
10. Februar 2005 Motor 35 Japan

MEMORANDUM

: [Messages](#)

Kodurussan Ruprai jai
Isumbilen Vahit meritibikan pagaisi tiguk terapisipan dui
earaduan koondegotan sepaediaman (erestutam) qesum
Berpasas Elgikotnik Kaptibukan Puthsalibega qihana
: Pemppotimka Jit Koordinasi Sisera Permitiusian
KESEAUA

KSGDUA : Tugce Tim Koordinasi Sistemi Perbetimleri Bosphorus
 Elektronik Kapıbası Paspasları sebesinden gün geçtikçe
 sistem Dijital Kasa'nı testiyi taşı;
 a). Tim İstebası;
 b). Tim Koordinasyonu
 c). Geçici istekler

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah:

a. Tim Pengarah:

- 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- 2) memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan pondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- 3) memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- 4) memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- 5) melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- 6) memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- 7) melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE;

b. Tim Koordinasi:

- 1) mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- 2) mengkoordinasikan layanan pemerintahan;
- 3) melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- 4) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Tim Koordinasi terdiri atas Kelompok Kerja yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

4. Kelompok Kerja Layanan SPBE:

- a) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Kabupaten Purbalingga;
- b) mengkoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- c) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
- d) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga;

3. Kedatangan Merti Tora Kedua SPBE:
a) memberikan penjelasan strategi bendaharaan dan
kebijakan SPBE di tingkat nasional Pemerintah Kapolda seluruh
Provinsi;

b) mengkoordinir pengembangan bendaharaan provinsi dan
berdiskusi bersama dengan SPBE yang memiliki
kompetensi teknis dalam bidang bendaharaan guna
meningkatkan kinerja administrasi dan komunikasi;

c) memberikan bantuan dan evaluasi proses
pendidikan, pencadangan, dan dikomunikasi kegiatan SPBE secara
langsung;

d) memberikan hasil berdiskusi serta rekomendasi
kebijakan Kedua Tim Koordinasi SPBE Kapolda seluruh
Provinsi;

3. Kedatangan Merti Waskijewono SPBE:
a) memberikan penjelasan strategi bendaharaan
dan memberikan SPBE di tingkat nasional Pemerintah
Kapolda seluruh Provinsi;

b) mengkoordinir pengembangan bendaharaan provinsi dan
berdiskusi mengenai Masalah Dinas, Masalah Dinas
Masalah Dinas, Masalah Dinas, Masalah Dinas, Masalah
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Masalah
Pengetahuan, Masalah, Pengembangan dan
Masalah Fisik seluruh SPBE;

c) memberikan bantuan dan evaluasi proses
pendidikan guna dikomunikasi melalui SPBE
social media; dan

d) memberikan hasil berdiskusi melalui SPBE
kebijakan Kedua Tim Koordinasi SPBE Kapolda
seluruh Provinsi;

4. Kedatangan Merti Pakuan SPBE:
a) memberikan penjelasan strategi bendaharaan
dan memberikan SPBE Kapolda seluruh Provinsi;

b) mengkoordinir pengembangan bendaharaan melalui
diskusi dan komunikasi dengan pihak
spesifik guna meningkatkan mutu layanan publik
perpustakaan;

c) memberikan monitoring dan evaluasi proses
berdiskusi untuk layanan administrasi
bentuknya, perpustakaan efektivitas pelayanan
publik perpustakaan efektivitas sejauh ini;

d) memberikan hasil berdiskusi melalui pelayanan
SPBE kebijakan Kedua Tim Koordinasi SPBE
Kapolda seluruh Provinsi;

c. Sekretariat SPBE:

- 1) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- 2) membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purbalingga; dan
- 3) menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juni 2023
Plh. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI

SUDONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/ 217 TAHUN 2023
TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

1. TIM PENGARAH

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Purbalingga	Ketua Tim Koordinasi SPBE
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua Tim Koordinasi SPBE

2. TIM KOORDINASI

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Koordinator

3. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINSOSDALDUK KBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 TAHUN 2023
 NOMOR
 TENTANG
 SISTEM KORDINASI TIM
 PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM PEMERINTAHAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEGIATAN DINAS/DEPARTEMEN/POLITEKNIK
BERBASIS SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

I. TIM PENGARAH

No.	Nama/Dapat Titik	Nature/Sifat	Mengelompokan Dapat Titik
1.	Bupati Purbalingga	Kepala Tim Koordinasi SPBE	
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua Tim Koordinasi SPBE	

II. TIM KORDINASI

No.	Nama/Dapat Titik	Kelompokan Dapat Titik	Nature/Sifat
1.	Gubernur Daerah Kapolda Bupati	Koordinator	Spesialisasi Daerah Kapolda Bupati
2.	Wakil Bupati	Koordinator	Spesialisasi Daerah Kapolda Bupati

III. KELUAROBOK KERTA KERJAKAN INTERNAL SPBE

1.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
2.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
3.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
4.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
5.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
6.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
7.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
8.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
9.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
10.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
11.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
12.	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga	Anggota	Reksa Dinkominfo Kapolda Purbalingga
13.	Reksa DINSOADALUK KBPA Kapolda	Anggota	Reksa DINSOADALUK KBPA Kapolda
14.	Reksa DINNAKER Kapolda	Anggota	Reksa DINNAKER Kapolda
15.	Reksa DKPS Kapolda	Anggota	Reksa DKPS Kapolda
16.	Reksa DPH Kapolda	Anggota	Reksa DPH Kapolda
17.	Reksa DPKB Kapolda	Anggota	Reksa DPKB Kapolda
18.	Reksa DPKD Kapolda	Anggota	Reksa DPKD Kapolda
19.	Reksa DPKP Kapolda	Anggota	Reksa DPKP Kapolda
20.	Reksa DPKS Kapolda	Anggota	Reksa DPKS Kapolda
21.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
22.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
23.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
24.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
25.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
26.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
27.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
28.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
29.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
30.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
31.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
32.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
33.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
34.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
35.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
36.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
37.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
38.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
39.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda
40.	Reksa DPLN Kapolda	Anggota	Reksa DPLN Kapolda

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
17.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala DINKOP UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala DINARSPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
36.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Analis Kebijakan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

4. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Sekretaris BAPPTELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota

NU KEDAMOK KERJA TATA KEGIATAN

No.	Waktu\Struktur Refleksi	Kedudukan Dalam Tafsir
1.	Kebutuhan Ekspresi Organisasi Sebagai Kapsulasi	Purposes/Needs
2.	Insiden/Peristiwa Pusat Kapasitas	Happenings
3.	Sekuel/Isi BAKUADA Kapasitas	Sequel/Content
4.	Gejolak/BAKUADA Kapasitas Intergral	Intraprocesual
5.	Gejolak/BAKUADA Kapasitas Intrinsik	Autogen

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
6.	Sekretaris BAKESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Sekretaris BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris DINARPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Sekretaris DINKOPUKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Sekretaris DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Sekretaris DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Sekretaris DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Sekretaris DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Sekretaris DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Sekretaris DINDIK Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Sekretaris DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Sekretaris DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Sekretaris DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Sekretaris DPUPR Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Sub Koordinator Tata Kelola <i>E-Government</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

5. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota

3. KERWONOK KIRYA MANAGEMENT SPBE

No.	Naam \ Series Reeks	Kategorie \ Grootte \ Tipe
1.	Hobela Bijsing Interieurkunst TK, Sintseik kunst	Beeldhouw
2.	Antiek	Antiek
3.	Antiek	Antiek

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
3.	Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Statistik / Fungsional Statistisi pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Sub Koordinator Diseminasi Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Fungsional Statistisi pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Fungsional Sandiman pada Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Fungsional Pranata Humas pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

6. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Informatika DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Unsur Kepala Sub Bagian Perencanaan / Fungsional Perencana pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi pada DINKOMINFO Purbalingga	Anggota
5.	Pranata Komputer pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

7. SEKRETARIAT

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sub Koordinator Tata Kelola E-Government pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

No.	Warts\Gelben Recht	Kedudukan Dalam Jln	Warts\Gelben Recht	Kedudukan Dalam Jln
3.	Antara Kepala kereta bas dan Basikal Orangtuas		Sekarang Kapbasen yang diluluskan	
4.		Sudah Konsultasi bersama dengan Dinas Perbandaran	Giatistik \ Pendidikan Sistematis bersama Dinas Perbandaran	Injunsurans TIK Giatistik dan Perbandaran
5.		Sudah Koordinasi bersama dengan Kemenseri	DINKOMINFO Kapbasen Pungutma	DINKOMINFO Kapbasen Pungutma
6.		Sudah Koordinasi bersama Dinas Perbandaran	Dikiran Injunsurans Papir	Dikiran Injunsurans Papir
7.		Lembongan Berasal bersama Dikiran	DINKOMINFO Kapbasen Pungutma	DINKOMINFO Kapbasen Pungutma
8.		Pungutmaan Sungai bersama Dikiran	Justeritik dan Perbandaran	Justeritik dan Perbandaran
9.		Mingguan bas dan Komuniti Papir	Justeritik dan Komuniti Papir	Justeritik dan Komuniti Papir
10.		Kedua-dua mingguan mingguan DINKOMINFO		

e. KETIWAH KERTY LAYAWAN SPBE

No.	Warts\Gelut Recht	Kedudukan Dalam Jln	Warts\Gelut Recht	Kedudukan Dalam Jln
1.	Kedua-dua mingguan mingguan DINKOMINFO		Kapbasen Pungutma	
2.	Kedua-dua mingguan mingguan dinas perbandaran		Kedua-dua mingguan mingguan dinas perbandaran	
3.	Untuk Kedua-dua mingguan mingguan \		Dari hari Minggu hingga Sabtu setiap minggu	
4.	Sudah Koordinasi bersama Dikiran		Dikiran di tingkatan bersama-sama Kepala kereta bas	
5.			Pungutmaan	
6.			DINKOMINFO Kapbasen	
7.			Pemasar Komuniti bersama DINKOMINFO	
8.			Kapbasen yang diluluskan	

f. SEKRETARIAAT

No.	Warts\Gelut Recht	Kedudukan Dalam Jln	Warts\Gelut Recht	Kedudukan Dalam Jln
1.	Seputera DINKOMINFO			
2.	Sudah Koordinasi bersama Dikiran		DINKOMINFO Kapbasen	

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
3.	Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Pranata Komputer pada Bidang Informatika DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Pelaksana pada Bidang Informatika DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juni 2023

Plh. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI

